

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

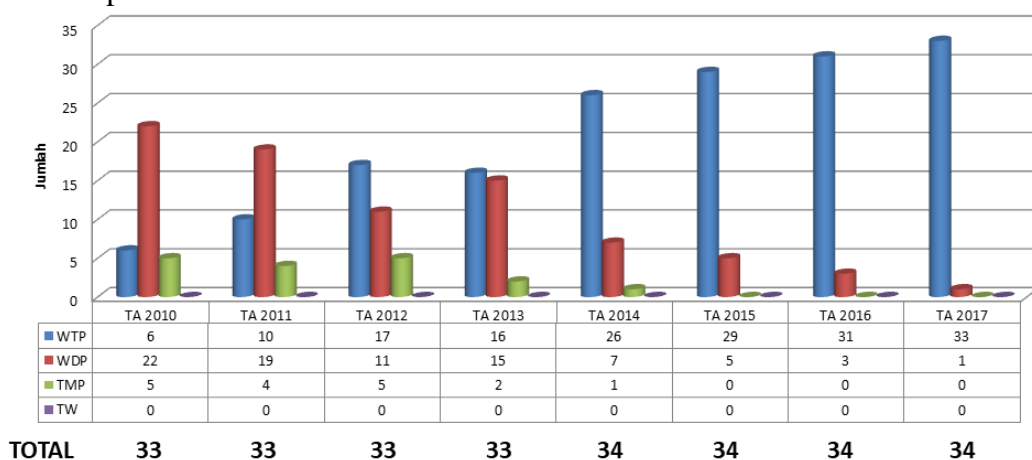
Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Halim, dkk, 2012).

Salah satu konsekuensi dari kondisi di atas yaitu pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Hidayattullah dan Herdjiono (2015) mengungkapkan bahwa dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sistem pelaporan yang baik sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajerial. Laporan yang menjadi umpan balik dari pelaksanaan anggaran diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang

dilaksanakan, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan di dalam pelaporan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan konsisten (Kusumaningrum, 2010).

Fenomena yang terjadi saat ini sehubungan dengan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah memperlihatkan bahwa opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK bukan merupakan jaminan tidak adanya korupsi. Berikut ini grafik peningkatan opini dari BPK di setiap provinsi di Indonesia selama 8 tahun terakhir:

Gambar 1.1
Opini BPK atas LKPD Provinsi di Indonesia Selama 2012 s.d 2018



Sumber: BPK RI – Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan setiap tahun bertambah jumlah peraih WTP di pemerintah Provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa laporan yang dibuat semakin membaik. Meskipun demikian laporan tersebut tidak menjamin pada substansi dari maksud laporan tersebut dibuat. Bahwa laporan tersebut semestinya terbebas dari praktik *mark up*, pemborosan, dan korupsi.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih banyaknya ditemukan ketidakpatutan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.524 permasalahan sebesar Rp2,35 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.020 permasalahan (BPK RI, 2022).

Tabel 1.1
Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2021

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	2.885	1.452,54
• Potensi kerugian	667	371,21
• Kekurangan penerimaan	972	534,76
Sub total (1) – berdampak finansial	4.524	2.358,51
• Penyimpangan administrasi (2)	2.020	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	6.544	2.358,51
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		331,85

Sumber: Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2022 (BPK RI, 2022)

Penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas akan menggambarkan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerahnya. Laporan keuangan memberikan informasi aktivitas transaksi pemerintah yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan berguna dalam rangka proses pembuatan keputusan baik itu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi karena dapat memberikan informasi mengenai sumber, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan. Pengelolaan keuangan

daerah yang tidak dilaksanakan dengan baik membuka peluang untuk terjadinya korupsi yang merugikan masyarakat di daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Arisman, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *tools* penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah yang dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Dewi et.al (2023)

mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dari implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang juga ikut menentukan kualitas laporan keuangan yaitu dukungan teknologi informasi. Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil temuan BPK RI (2022) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 menyebutkan bahwa faktor kurangnya dukungan teknologi informasi juga ikut mempengaruhi terjadinya kasus-kasus ketidakpatuhan dalam penyusunan LKPD. Informasi merupakan produk dari teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil putusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan menjadi lebih efektif.

Penelitian mengenai pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Dewi et.al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasi SIPD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan. Sementara itu, penelitian Wulandari dan Yuliati (2023) mengungkapkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penempatan variabel pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening yang menghubungkan pengaruh implementasi SIPD dengan kualitas LKPD. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia dan Suwondo (2023) mengungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, berdasarkan penelitian Vidyasari dan Suryono (2021) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan lainnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menempatkan variabel teknologi informasi sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wuldandari dan Yuliati (2023) dan Sarwono dan Handayani (2021) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Begitupun dengan penelitian Dwirini (2023) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi TI tidak berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan.

Masih adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Provinsi Jambi menjadi alasan penggunaan OPD di Provinsi Jambi. Ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan masih terbatasnya dukungan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di Bank Pembangunan Daerah Jambi, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah?

5. Bagaimana kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
6. Bagaimana kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh pengelolaan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Instansi

Bagi Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan hasil studi ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan atau kontribusi yang konstruktif dalam pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik.

2. Untuk Pendidikan

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pustaka atau referensi dengan masalah yang berhubungan dengan peningkatan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

